BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lingkup Departemen Kehutanan yang mengelola hutan dipulau Jawa. Terdapat tiga unit kerja, masing-masing, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat dan Banten.

Jawa Barat wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Dengan posisi demikian, maka hutan di Jawa Barat dan Banten merupakan salah satu penyangga kesinambungan lingkungan dengan kedudukan yang amat penting.

Dengan luas sekitar 4,4 juta Ha, secara kedudukan geografis kedua propinsi ini berada 104^0 – 108^0 18 BT 5^0 51-7^0 50 LS. Dari luas keseluruhan, 22,2% diantaranya merupakan lahan datar dengan kemiringan 0-3% yang sebagian besar berada dibagian utara. Sementara itu bagian tengah selatan bertopografio landai sampai curam, berbukit serta bergunung dengan ketinggian ada yang mencapai 3.078 m dpl.

Propinsi Jawa Barat dan Banten dipengaruhi oleh 55 buah aliran sungai yang meliputi 26 Daerah Aliran Sungai (DAS). 3 DAS bermuara di selat sunda, 12 ke Laut Jawa, dan selebihnya bermuara ke Sungai Samudera Indonesia. Beberapa DAS yang besar diantaranya Cisanggarung, Cimanuk, Cipanunggara, Citarum dan DAS Ciujung. Terkelolanya hutan dipulau Jawa Barat secara baik

akan menunjang keseimbangan lingkungan dalam menghadapi pesatnya laju pertumbuhan penduduk dengan segala dampaknya.

Selain itu di Jawa Barat terdapat 3 bendungan besar sebagai pembangkit listrik untuk menyuplai kebutuhan listrik daerah Jawa, Bali, madura dan Jakarta. Bendungan tersebut masing-masing Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Ketiganya mengandalkan pasokan air dari sungai Citarum.

Berdasarkan kepemilikannya, hutan terbagi menjadi *hutan negara* dan *hutan milik*. Hutan negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik. Sementara hutan milik adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik.

2.1.1. Riwayat Pengelolaan Hutan di Jawa Barat (1945 - Sekarang)

1) Djawatan Kehutanan (1945 - 1947)

Dalam sekade 1945 – 1947, karena keadaan politik, djawatan kehutanan hanya dapat menjalankan tugasnya di Sumatera dan Jawa saja dengan susunan organisasi yang sangat sederhana. Di jawa Barat, Djawatan Kehoetanan saat itu dipimpin oleh R. O. Nurhadi sebagai inspektur Kehutanan bagian I Bandung dengan Surat Ketetapan Menteri Kehutanan Departemen Kemakmuran tanggal 24 Oktober 1945 No. 735/A/Keh.

Pada masa revolusi fisik tersebut, tugas pokok Djawatan Kehoetanan adalah turut mempertahankan Republik Indonesia secara de facto dan menyelamatkan harta kekayaan Negara bersama-sama militer dan pemerintah sipil lainnya.

2) Planologi Kehutanan (1947 – 1952)

Tahun 1947, terbentuk Negara pasundan , dan instansi Kehutanan berubah menjadi *De Dienst Van Het Boswezen Van Nagara pasundan* yang dipimpin Ir. C.Y. Moul hingga tahun 1949. Pada tahun itu juga kehutanan mulai disusun secara federatif, serta dipertengahan tahun 1949 tersebut dibebtuk suatu bagian baru yang disebut Planologi Kehutanan, dipimpin R.H. Odang sampai tahun 1952. Sebelumnya, ditahun 1951 terbit SK Kehutanan tangal 17 November 1951 No. 4212 yang memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal 1 september 1951 dibentuk Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat yang dipimpin oleh R. Oesman nandika.

Peraturan Pemerintah No. 20/1952 menetapkan kehutanan di Jawa dan Madura dibagi-bagi menjadi Inspeksi Kehutanan Bagian I yang dipimpin oleh R. Koesnowarso sebagai Inspektur, tidak lama kemudian ia diganti M. saroso.

3) Brigade Planologi Kehutanan (1952 – 1957)

Tahun 1953, Kepala djawatan Kehoetanan dengan SK tanggal 1 Oktober 1953, No. 17777/KD/1/5 mengukuhkan susunan organisasi tiap inspeksi, sehingga mempertegas garis komando dan koordinasi. Dikarnakan tahun 1954, M. saroso meninggal dunia, R. Usman Nandika yang semula menjabat Kepala Brigade I Planologi Kehutanan jawa Barat dan tempatnya di Brigade Planologi kemudian dijabat adang durachman.

4) Dinas Kehutanan, Khusus di Jawa Barat (1957-1978)

Pada tahun 1957, terbit Peraturan Pemerintah No. 64/1957 yqng menetapkan penyerahansebagian Pemerintah Pusat dilapangan, Perikanan laut, Kehutanan dan Karet Rakyat pada daerah-daerah Swatantra Tingkat I. maka berubahlah status Inspeksi kehutanan bagian I Jawa Barat menjadi Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat. Selaku Kepala Dinas ditunjuk R. Oesman nandika sampai masa pensiunnya si tahun 1964, dan digantikan Adang Duracman hingga 1971.

Pada awal tahun 1971 sampai mei 1971, dinas Kehutanan Prop. Jawa Barat dipimpin Ir. Sulaeman pardtadisastra yang selanjutnya digantikan Rp. Usman Mu,min, BScF sebagai Kepala Dinas definitive sampai akhir Februari 1978. Akan halnya brigade Planologi Kehoetanan Jawa Barat selama periode 1964-1971 mengalami dua kali pergantian pimpinan, yakni Ir. Yunus Kartasubrata dan andi Riva'I yang selanjutnya digantikan Ir. M. Simbolon sampai awal tahun 1978.

5) Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (1978 – 2000)

Pada awal 1978, status Dinas Kehutanan Prop. Jawa Barat berubah menjadi Perum Perhutani Unit III Jawa barat , dengan Kepala Unit yang pertama, Ir. Suherman buhron. Dalam waktu yang sama, Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat dilebur kedalam tubuh Perum Perhutani Unit III Jawa Barat menjadi Biro Perencanaan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.

Perum Perhutani Unit III Jawa Barat , lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2/1978 tanggal 3 Februari 1978 setelah sebelumnya melebur Dinas Kehutanan Jawa Barat. Peresmian perubahan peralihan pengelolaan tersebut dilaksanakan tanggal 10 februari 1978 oleh Menteri Pertanian.

Dengan pertimbangan untuk keberhasilan tugas, fungsi perencanaan kehutanan Jawa Barat, dengan SK Menteri Pertanian No. 121/Kpts/Org/1978 tanggal 27 Februari 1978 merubah status Brigade planologi Kehutanan Jawa Barat menjadi Biro Perencanaan Unit III perum Perhutani Jawa Barat. Serah terima usulan kehutanan serta urusan perencanaan hutan Jawa Barat kepada Perhutani dilaksanakan tanggal 27 februari 1978.

6) PT. Perhutani (Persero) Unit III Jabar dan Banten (2000-2003)

Dalam perjalanannya dari sejak lahir sampai dengan tahub 2005, landasan hukum Perum Perhutani mengalami bebrapa perubahan yang sangat signifikan sehingga merubah setatusnya dari Perusahaan umum menjadi Perusahaan terbatas (Persero). Peralihan bentuk tersebut dituangkan dalam peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2001 tentang pengalihan bentuk Perusahaan umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani menjadi Perseroan (Persero).

Perubahan status Perum ke Perseroan ditahun 2000 tersebut terjadi karena kondisi politik dipemerintahan yang tidak menentu. Pemerintah menganggap Perum Perhutani sebagai BUMN, selayaknya memberikan konstribusi setinggi-tingginya kepada nergara, tanpa memperhitungkan karakteristik wilayah pulau jawa yang padat penduduk dengan tingkat kebutuhan yang sangat tinggi.

Bagi Perum Perhutani Unit III, terjadinya pemecahan banten yang semula termasuk Propinsi Jawa barat menjadi Propinsi tersendiri, merubah namanya mebjadi PT. Perhutani (Persero) Unit III Jawa Barat dan Banten.

7) Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten (2003 – Sekarang)

Bentuk Perseroan hanya bertahan kurang dari 3 tahun. Selanjutnya berdasarkan PP No 30 Tahun 2003 tentang Perhutani, status Perseroan menjadi Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Alasannya antara lain karena kapasitas perseroan dinilai Pemerintah tidak cocok diterapkan dipulau Jawa yang berpenduduk padat yang sangat membutuhkan kegiatan social seperti yang dilakukan Perum Perhutani.

Visi dan Misi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten

Visi

Menjadi Pengelola Hutan Tropis Terbaik di Dunia

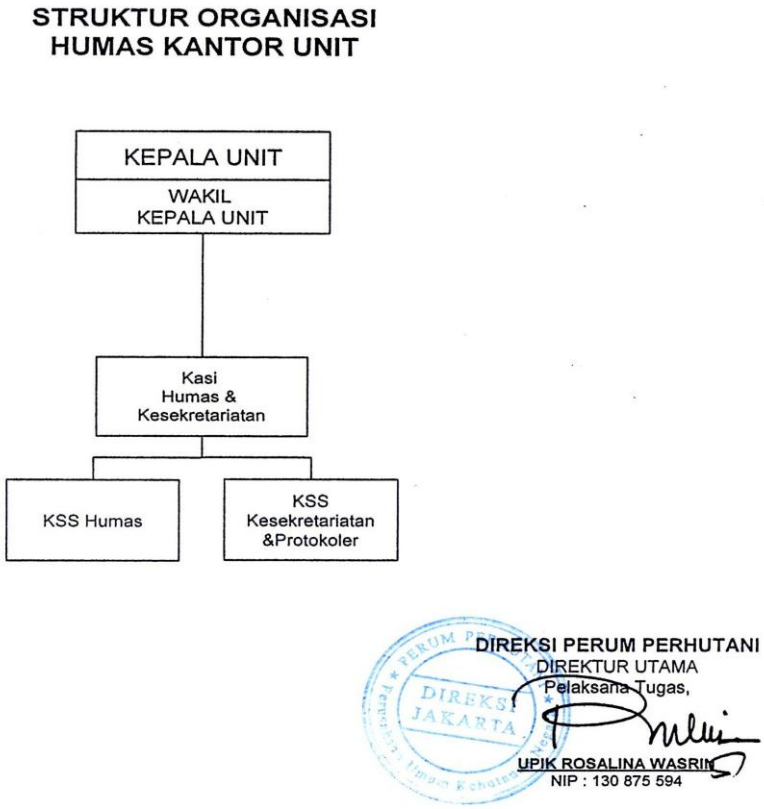
Misi

a. Mengelola hutan tropis dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari Bersama Masyarakat.
b. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai sumber daya hutan.
c. Mengoptimalkan manfaat hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan serta potensi lainnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan serta kesejahteraan masyarakat (sekitar hutan).
d. Membangun sumberdaya manusia perusahaan yang bersih, berwibawa dan profesional.

e. Mendukung dan berperan serta dalam pembangunan wilayah dan perekonomian nasional.manajemen

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Humas Kantor Unit Sebagai Berikut :

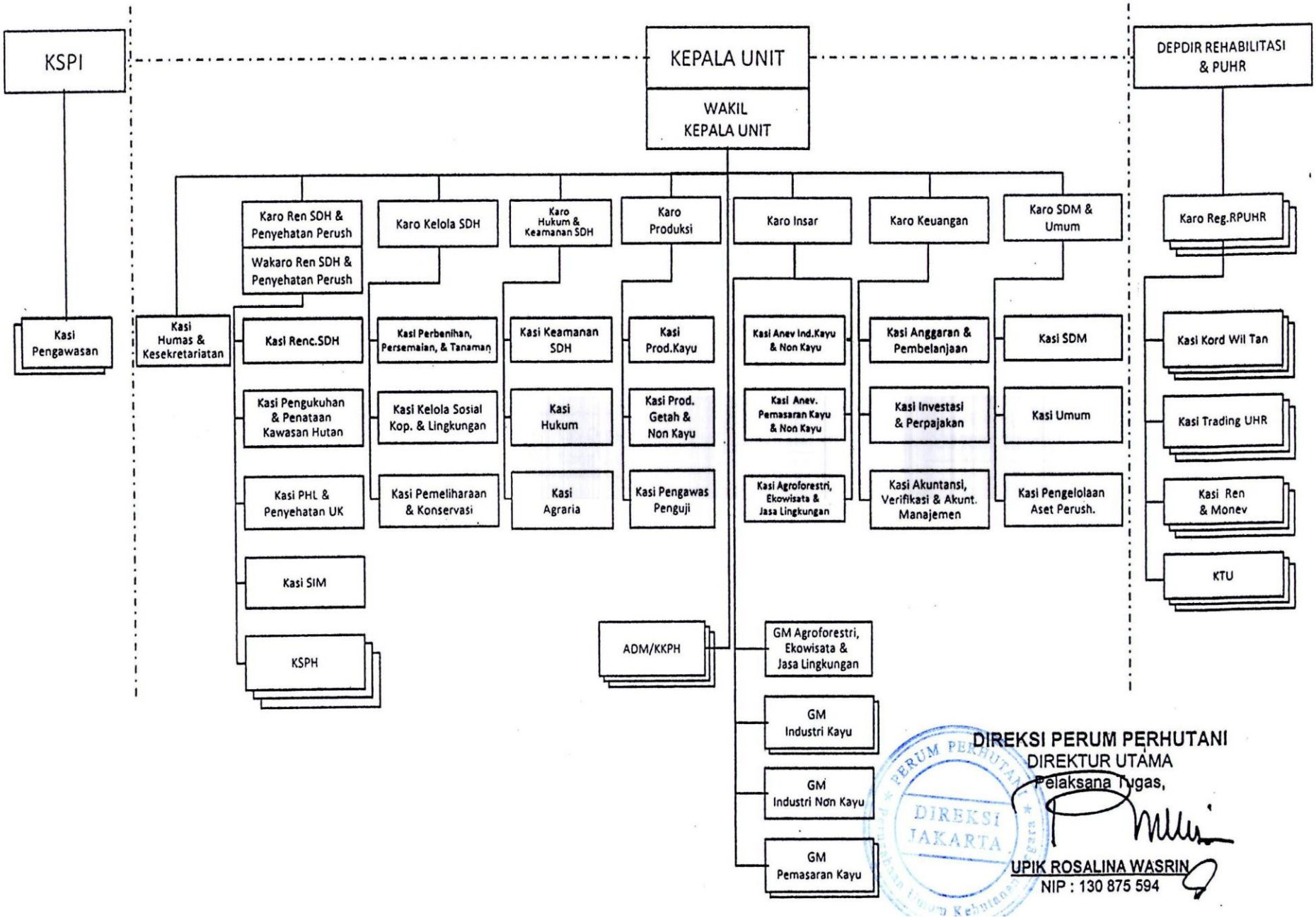


Gambar 2.1

Berdasarkan SK Direktur Utama Perum Perhutani No. 554/ KPTS/ DIR/ 2005, tanggal 26 September 2006, tentang struktur organisasi di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI
NOMOR : 199/KPTS/DIR/2009
TANGGAL : 04 MEI 2009

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT (GENERIK)



DIREKSI PERUM PERHUTANI
DIREKTUR UTAMA
Pelaksana Tugas,

UPIK ROSALINA WASRIN
NIP : 130 875 594

Deskripsi Jabatan

a Identitas Jabatan

Nama Jabatan : Kepala Seksi Humas dan Kesekretariatan

Bagian/Unit kerja : Sekretariat Perusahaan

Atasan langsung : Secretary Unit and Legal Head

b Wewenang

1. Membuat *Press Release*
2. Mewakili Pimpinan dalam melayani kebutuhan komunikasi dengan pihak ekternal
3. Menerbitkan Majalah Internal Perusahaan (Unit III Jawa Barat dan Banten) ”Dadali”
4. Membangun *website* untuk mempublikasikan informasi kepada publik

c Tugas Pokok

1) Mempublikasikan kegiatan, kebijakan dan semua yang dianggap perlu untuk disampaikan kepada Publik.
2) Mendokumentasikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy semua kegiatan Perusahaan.
3) Memperkirakan, menganalisis dan menginterpretasikan opini dan sikap publik, dan isu-isu yang mungkin memengaruhi operasi dan rencana Perusahaan, baik itu pengaruh buruk maupun baik.
4) Memberi saran kepada manajemen di semua level di dalam Perusahaan sehubungan dengan pembuatan keputusan, jalannya tindakan, dan

komunikasi dan mempertimbangkan ramifikasi publik dan tanggung jawab sosial Perusahaan.

5) Meriset, melaksanakan dan mengevaluasi secara rutin program-program aksi dan komunikasi untuk mendapatkan pemahaman publik yang dibutuhkan untuk kesuksesan perusahaan.
6) Merencanakan dan mengimplementasikan usaha organisasi untuk memengaruhi atau mengubah kebijakan publik.
7) Mengkoordinir dan atau memfasilitasi kegiatan eksternal yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
8) Mencatat dan mengingatkan agenda kegiatan pimpinan
9) Mempersiapkan kegiatan seremoni yang melibatkan Pimpinan
10) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental dan pengembangan diri karyawan.
11) Membuat rencana anggaran kegiatan.

d Tugas Pendukung

1. Memfasilitasi unit kerja internal baik kelola SDH maupun kelola bisnis untuk berhubungan dengan pihak eksternal agar tercipta komunikasi positif untuk tujuan perusahaan.
2. Mengkoordinir unit kerja lain dalam hal penyediaan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan pimpinan maupun kebutuhan eksternal.
3. Mendukung kegiatan pengelolaan resiko di unit kerjanya agar target perusahaan tercapai dengan dampak yang seminimal mungkin.

1. Identitas Jabatan

Nama Jabatan : Kepala Sub Seksi Humas & Dokumentasi

Bagian/Unit kerja : Sekretariat Perusahaan

Atasan langsung : Kepala Seksi Humas & Kesekretariatan

2. Wewenang

1) Menyiapkan bahan untuk press release
2) Penyajian data untuk Pimpinan dalam rangka melayani kebutuhan komunikasi dengan pihak ekternal.
3) Menyiapkan data untuk web site dalam rangka publikasi informasi kepada publik
4) Membangun hubungan baik dengan pihak eksternal dan melakukan pembinaan generasi muda (Saka Wanabakti, Pencinta Alam, dll)

3. Tugas Pokok

1) Menyusun Rencana Anggaran kegiatan bidang kehumasan sesuai RO dan RKAP.
2) Melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan bidang kehumasan tingkat Unit dan KPH.
3) Melaksanakan koordinasi dan pelayanan bidang kehumasan dengan badan, lembaga dan instansi terkait.
4) Pembinaan kehumasan tingkat KPH.

5) Melaksanakan fungsi Kehumasan dalam membangun jejaring kerja Kehumasan dengan Perusahaan lain.
6) Melakukan penyusunan program penerangan dan penyuluhan melalui media masa dan media elektronik.
7) Mempersiapkan bahan penerbitan media informasi, audio visual dan media elektronik lainnya.
8) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental dan pengembangan diri karyawan.
9) Melaksanakan hubungan dengan generasi muda (Saka Wanabakti, Pecinta Alam, Karang Taruna, dll) agar tercipta komunikasi yang harmonis
10) Menyusun laporan pekerjaan, merumuskan permasalahan dan penyelesaiannya dalam bidang kehumasan.

4. Tugas Pendukung

1) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja lain yang sederajat dalam hal dukungan hubungan dengan pihak eksternal.
2) Mendukung kegiatan unit kerja lain yang sederajat dalam hal menyebarluaskan informasi
3) Penyelenggaraan perpustakaan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan wawasan

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Adapun tugas dan wewenang dari Perum Perhutani Unit III jawa Barat dan Banten , diantaranya :

1) Mengelola hutan tropis dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari Bersama Masyarakat.
2) Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai sumber daya hutan.
3) Mengoptimalkan manfaat hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan serta potensi lainnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan serta kesejahteraan masyarakat (sekitar hutan).
4) Membangun sumberdaya manusia perusahaan yang bersih, berwibawa dan profesional.
5) Mendukung dan berperan serta dalam pembangunan wilayah dan perekonomian nasional.

Program-program *Corporate Sosial Responsibility* di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat

1) Bidang Sosial

Di bidang sosial, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten meningkatkan aktivitas pendidikan, keagamaan, kesehatan, olahraga, seni budaya dan bantuan bagi korban bencana alam.

2) Bidang Lingkungan

Di bidang lingkungan, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten aktif dalam penghijauan (*green belt*) dan penyuluhan lingkungan, perbaikan jalan, penyediaan air bersih/sumur, pendirian gedung sekolah.

3) Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten mewujudkan kepedulian terhadap kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan membuat program yang bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat, melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Jenis Kerjasama Pengelolaan Huatan Bersama Masyarakat (PHBM)

1. Kerjasama Persemaian, tanaman,
2. Kerjasama Pemeliharaan dan pengamanan tegakan
3. Kerjasama Agroforesty
4. Kerjasama pemanfaatan lahan oleh MDH (Sawah/kebun)
5. Kerjasama usaha peternakan
6. Kerjasama pengelolaan wisata
7. Kerjasama perlindungan hutan (pengembalaan) dll
8. Kerjasama pembangunan hutan rakyat
9. Kerjasama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)